

**SISTEM BAGI HASIL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KOTA GARO KECAMATAN  
TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syariah  
(S.Sy)



**OLEH**

**SONY HENDRI  
NIM. 10622003769**

**PROGRAM STUDI S1  
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1434 H/2013 M**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahamat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Sistem bagi hasil Perkebunan Kelapa sawit ditinjau menurut perspektif hukum islam (studi kasus bagi hasil perkebunan kelapa sawit desa kota garo kecamatan tapung hilir kabupaten kampar"**

Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW, seorang Nabi dan Rasul pembawa rahmat bagi dunia dan hujjah bagi seluruh manusia, yang diutuskan untuk menyempurnakan akhlak dan penutup risalah kenabian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya telah banyak melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

1. Teristimewa ayahanda Dafles (Alm) dan ibunda Hj. Parisnatimu dan nenek handa Nurima yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, yang selalu mendo`akan, dan memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah S1 ini. Terima kasih atas untuk ayahanda dan ibunda semoga Allah swt. Membalasnya dengan pahala amiin.
2. Bapak Prof. DR. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak DR. H. Akhbarizan, M.A, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, pembantu Dekan II, dan pembantu Dekan III.
4. Bapak Zulfahmi Bustami,M.ag dan bapak Kamirudin M.ag selaku Ketua dan sekretaris jurusan muamalah.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak kastulani.Sh.Mh selaku Penasehat Akademis.
7. Kepada Bapak Ibu Dosen dan Karyawan atau karyawan Pakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
8. Bapak H.ILYAS.S selaku kepala desa kota garo yang turut membantu dalam kelancaran penulisan skripsi saya
9. Adekku darmawan,bripda mulyadi dan lita nofrila dan seluruh keluarga besarku yang lain yang telah mendoakan dan memberikan motifasi untuk penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Buat teman-temanku M.hasril kamil,s.hi, dalisman st,hindi junaidi s.sy,arman berkah cell, .khatamul kharim,s.sy, sukri alwi,ilham zakki,saiful anwar,bro ujang,bro dayat,mas bram dan yang teristimewa jawanis, S.pd. yang selalu sabar dan terus memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini jauh sekali dari kesempurnaan secara ilmiah, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu, saran, kritik, dan sumbangan pikiran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah lah kita memohon petunjuk, pertolongan dan tempat berlindung dari jalan kesesatan. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, Amin ya Rabbal'amin.

Penulis

**SONY HENDRI**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan .....	7
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi geografis .....	12
B. Kondisi demografis .....	13
C. Pendidikan.....	14
D. Kehidupan beragama.....	16
E. Sosial ekonomi masyarakat.....	18
F. Adat istiadat .....	19
<b>BAB III   GAMBARAN UMUM BAGI HASIL MENURUT ISLAM</b>	
A. Pengertian.....	22
B. Prinsip-prinsip bagi hasil .....	24
C. Macam bagi hasil .....	27
D. Dasar-dasar hukum bagi hasil .....	48
E. Pendapat ulama tentang bagi hasil.....	52
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sistim akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit didesa kota garo kecamatan tapung hilir .....	56
B. Amplikasi akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit didesa	

kota garo kecamatan tapung hilir.....	59
C. Tinjauan hukum islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit didesa kota garo kecamatan tapung hilir.....	62
<b>BAB V   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia yang dianugrahi oleh Allah SWT kekayaan berupa sumberdaya alam yang berlimpah ruah, baik di darat, perairan maupun di udara merupakan dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya, dan mata kehidupan manusia pada umumnya. Menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, baik antara manusia dengan ekosistemnya.<sup>1</sup>

Tanah mengandung arti yang sangat luas termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Tanah yang dimaksud disini ialah kebun, sawah, atau tanah kosong lainnya untuk kepentingan pertanian dan lain-lainnya.

Manusia hidup tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Kebutuhan terhadap tanah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan makan dan minum, air dan udara. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa tak sedikit orang yang sepanjang hidupnya hingga mati, tak memiliki sejenkalpun tanah, baik untuk sarana tempat tinggal maupun sebagai modal usaha produktif. Padahal bumi yang terbentang luas dengan seluruh kekayaan

---

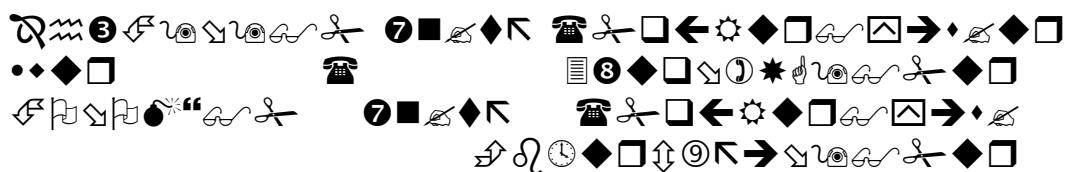
<sup>1</sup> Moh. Soejani dan Rozi Munir, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, (Jakarta; Universitas Indonesia, 1987), hal. 45

alamnya di udara, darat, laut dan diperut bumi ini, dijadikan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia.

Tanah-tanah diwilayah perkotaan yang dahulunya merupakan lahan subur untuk pertanian, kini dipadati dengan pembangunan pemukiman baru, yang berdampak pada menurunnya produksi pertanian. Sementara itu diwilayah pedesaan semakin banyak lahan perkebunan yang dikuasai oleh para pemilik modal besar. Tidak sedikit petani yang di desa melepas lahan perkebunan miliknya karena didesak oleh keadaan ekonomi yang semakin terpuruk, akibat meningkatnya biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pada akhirnya pemilik tanah menjual lahan perkebunannya.<sup>2</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga petani (pengelola) dan pemilik kebun mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, petani (pengelola) akan kesulitan untuk mencari nafkah tanpa ada kebun dan pemilik kebun, begitu juga dengan pemilik kebun yang sangat membutuhkan tenaga dari petani (pengelola), sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana firman Allah SWT



<sup>2</sup> <http://www.Perkotaandanpedesaan/zamansekarang>



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al-Maidah/5:2).<sup>3</sup>

Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya didalam masyarakat. Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri, dalam hal ini penulis lebih membahas kepada kerjasama dalam bentuk pertanian. Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, sebagaimana imam Al-Qurtubi memandang bahwa usaha pertanian adalah fardu kifayah. Dimana pemerintah wajib memaksakan manusia kearah itu dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon.<sup>4</sup>

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada ketentuan Nabi Muhammad Saw dan juga telah dilaksanakan oleh para sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa nabi Muhammad Saw pernah bersabda :

هريرة عنه : عليه  
: بيننا وبين النخيل  
:

Artinya : Dari Abu Hurairah ra berkata : Orang-orang anshar berkata kepada Nabi Saw : Berkata korma itu diantara kami dan saudara-saudara kami, Beliau bersabda : kalian mencegah ongkos kepada kami, dan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), hal 98

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Beirut-al Fikr 1983), Jilid 3,h.191

kami bersekutu dengan kalian dalam buahnya. Mereka berkata :  
kami mendengar dan kami patuhi (HR. Bukhari).<sup>5</sup>

Sayyid Sabiq memberikan penjelasan terhadap hadist ini, yaitu :  
bahwa orang-orang anshor menginginkan melakukan kerjasama dengan  
orang-orang muhajirin dalam mengelola pohon korma, hal ini mereka  
sampaikan kepada Rasulullah, Rasul tidak bersedia, lalu mereka  
mengusulkan, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya dan mereka  
mendapat sebagian hasilnya, Rasulullah membolehkannya.<sup>6</sup>

Hadist di atas mengandung maksud dan anjuran tentang kebolehan  
seseorang untuk mengelola atau menggarap tanah milik orang lain. Hal ini  
seiring dengan kaedah ushul fiqh yang menyatakan bahwa seruan umat  
terdahulu menjadi dalil bagi kita sebelum ada dalil yang mengaturnya,  
”*Syarun man qablana*”.<sup>7</sup>

Dari uraian yang dikemukakan di atas, jelas terlihat perjanjian bagi  
hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan Nabi  
Saw dan begitu pula para sahabat pernah mengadakan perjanjian bagi hasil  
dalam bidang pertanian.<sup>8</sup>

Wahbah Al-Zuhailly dalam buku fiqh Al-Islami Wal 'Adillatuhu  
mengemukakan bahwa golongan Hanafi bahwa unsur-unsur akad secara  
umum adalah ijab dan qabul. Sementara, selain golongan Hanafiyah  
mengemukakan bahwa unsur-unsur akad itu adalah :

---

<sup>5</sup> Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bairut : Darul Kutub Al-Aliyah, 1992) Juz III, h. 95

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h. 169

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1996) Cet. I, h. 149

<sup>8</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asyaukany, *Nailul Al-Authar*, (Mesir : tp.tt), Juz V,  
h. 306

1. Orang yang berakad atau pihak-pihak yang melakukan akad
2. Objek akaq atau sesuatu yang ingin dilakukan atasnya akad
3. Shiqhat atau pernyataan kehendak masing-masing.<sup>9</sup>

Pernyataan kehendak ini atau dikenal dengan ijab dan qabul. Dalam penyampaian pernyataan ini tidak terikat dengan bahasa tertentu dan malah dapat dilaksanakan dengan tulisan atau isyarat dan sebagainya, yang penting tentunya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang ingin melaksanakan akaq dapat dipahami. Sebab nampaknya ijab dan qabul tiada lain jiwanya adalah sebagai perujudan diri adanya kerelaan bagi masing-masing pihak yang berakaq.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan bagi hasil ini oleh ulama fiqih ditentukan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan bagi hasil harus diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung atau memperkenalkan sifat-sifatnya.
2. Masa yang diperlukan itu juga diketahui dengan jelas, artinya seperti apa sistem bagi hasil dilakukan, harus diketahui oleh masing-masing pihak.
3. Perikatan itu dilaksanakan pada awalnya
4. Imbalan yang diterima oleh pengelola harus diketahui dengan jelas, misalnya separoh, sepertiga dan sebagainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Al-Islami Wa 'Adillatuhu*, (Bairut : Darul Fikri, 1989) Juz IV, h. 92

<sup>10</sup> Imam Taqyuddin abi bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar*, Terjemahan Rifa'i dkk, (semarang : CV. Toha Putra, 1978), h. 242

Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fiqih, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah* dan *mugharasah*. Itu merupakan sebagian bentuk dari aqad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pemanfaatan tanah. Atas dasar keterangan di atas, maka kerja sama dengan sistem bagi hasil diakui keberadaannya dalam agama Islam dan bila dapat dilaksanakan dengan ketentuannya tentu akan dapat membantu pihak yang melaksanakannya.

Desa Kota Garo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang mana kebanyakan penduduknya hidup dari hasil perkebunan sawit. Sistem yang dipakai oleh para petani beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Sebagian masyarakat mempunyai sistem pembagian keuntungan setengah dari hasil kebun dalam artian bagi dua antara pemilik dan pekerja, sebagian masyarakat yang lain mempunyai sistem bagi tiga dari hasil kebun dalam artian satu bagian untuk pekerja, dua bagian untuk pemilik kebun.

Sementara prinsip bagi hasil pada dasarnya ialah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat aqad dilakukan, kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadinya pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati. Namun yang saya lihat sistem bagi hasil didesa kotagaro aqad berubah dipertengahan. Membuat sistem bagi hasil didesa tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip bagi hasil dan syarat bagi hasil dalam Islam. Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk

membahas dan mengetahui lebih mendalam dan luas dengan mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)**

#### **B. Pembatasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penelitian ini, maka penelitian perlu diadakan pembatasan masalah. Dalam hal ini yang menjadi batasan masalah ialah: Sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar menurut perspektif hukum Islam.

#### **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana aplikasi akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut?

#### **D. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah.
- c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat menambah wawasan bagi penulis dan sebagai perbandingan antara teori yang diperoleh dengan penerapannya di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan sistem bagi hasil tanah perkebunan kelapa sawit.

## E. Landasan teoritis

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di desa kota garo kecamatan tapung hilir kabupaten kampar.

Dalam hukum Islam bagi hasil pengelolaan lahan ada tiga macam :

### 1. *Muzara'ah*

## 2. *Mukharabah*

## 3. *Musaqqah*

*Muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih, *muzara'ah* diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen<sup>11</sup>.

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah :

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Objek *Muzara'ah* yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan Kabul.

Secara sederhana ijab dan kabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).<sup>12</sup>

*Mukharabah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 245.

<sup>12</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), cet. Ke-2, h. 275.

<sup>13</sup> Prof.DR. H. Rachmat Syafei, M A. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), h. 212

*Musaqah* adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.<sup>14</sup>

Selanjutnya penentuan hukum bagi hasil perkebunan kelapa sawit di desa Kota Garo di tinjau menurut perspektif hukum Islam akan di bahas berdasarkan penetapan hukum Islam berdasarkan suatu peristiwa dengan memperhatikan faktor kemaslahatan bagi manusia dalam hidup, khususnya bagi masyarakat petani di desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

### **2. Subjek dan Objek penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik perkebunan kelapa sawit dan petani (pengelola) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, sedangkan yang menjadi objek dari penelitian adalah sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik lahan perkebunan kelapa sawit yang melakukan bagi hasil berjumlah 10

---

<sup>14</sup> *Ibit.*, h. 206.



orang, oleh karena jumlah populasi sedikit maka penulis menetapkan semua populasi sebagai sampel dengan teknik secara acak *total sampling*.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer : adalah data yang diperoleh dari responden (pemilik lahan perkebunan dan petani pengelola)
- b. Data sekunder : Data yang diperoleh dari berbagai pihak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### 5. Metode pengumpulan data

##### a. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

##### b. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan petani kelapa sawit guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil perkebunan kelapa sawit.

##### c. Konten analisis

Yaitu menganalisa sumber-sumber buku rujukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menerapkan tentang, Letak Geografisnya, Agama dan Pendidikan, Ekonomi Penduduk, Sosial Budaya dan Adat Istiadat.

### **BAB III GAMBARAN UMUM BAGI HASIL MENURUT ISLAM**

Menguraikan tentang, Pengertian, Prinsip-prinsip bagi hasil, Syarat dan rukun bagi hasil, Dasar-dasar hukum bagi hasil dan Pendapat ulama tentang bagi hasil.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Sistem akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, aplikasi akad bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan Tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar tersebut

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan dan mengemukakan beberapa saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis**

Secara geografis desa Kota Garo merupakan desa yang termasuk ke dalam pemerintahan Kecamatan Tapung Hilir Kampar Kabupaten Kampar. penduduk desa Kota Garo dapat dikatakan sebagai komunitas yang heterogen dari berbagai sisi.

Desa Kota Garo merupakan letak di ibu kota Kecamatan Tapung Hilir, yang berjarak dengan Ibukota Kabupaten  $\pm 70$  Km, sedangkan dengan Ibukota Propinsi  $\pm 96$  Km, secara geografis desa Kota Garo berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Telaga Sam-Sam dan M. Fajar,
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kota Bangun dan Koto Aman
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pantai Cemin dan Bencah Kelubi
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Koto Aman

Daerah ini merupakan dataran rendah yang banyak ditumbuhi pohon kelapa sawit yang subur. Disini juga terdapat sarana dan prasarana transportasi yang cukup lancar seperti, travel, superban, bis antar kota maupun propinsi, kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Jalan aspal yang menjadi penunjang yang menghubungkan antara desa Kota Garo dengan desa-desa lainnya.

Dengan demikian, desa Kota Garo merupakan daerah yang strategis dan mudah dijangkau terutama dengan jalur transportasi darat, sehingga memudahkan bagi pendatang maupun bagi para masyarakat yang ingin bepergian.

## B. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk suatu wilayah sangat menentukan dalam perkembangan pembangunan daerah. Kondisi penduduk sangat dibutuhkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perkembangan tingkat penduduk sangat dibutuhkan guna menentukan kebijakan pembangunan, sehingga memberikan kemudahan pemerintahan menata pemerataan pembangunan.

Berdasarkan data yang ada di desa Kota Garo, jumlah penduduknya adalah 3640 orang. Perkembangan penduduk di desa Kota Garo dapat dikatakan seimbang, dengan begitu terjadinya pertambahan penduduk tidak terlalu cepat. Demikian dapat diperhatikan dari tingkat umur setiap penduduk di desa Kota Garo, untuk melihat secara jelas tentang tingkat umur penduduk di desa Kota Garo dapat dilihat tabel berikut :

**TABEL I**  
**KOMPOSISI PENDUDUK DESA KOTA GARO**  
**BERDASARKAN TINGKAT UMUR**

No	Tingkat Umur Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 – 6 tahun	157	134	291	7,99
2	7 – 12 tahun	297	351	648	17,80
3	13 – 23 tahun	213	235	448	12,31
4	24 – 35 tahun	461	459	920	25,27
5	36 – 50 tahun	478	397	875	24,04
6	51 – 63 tahun	106	164	270	7,42
7	> 64 tahun	67	121	188	5,16
<b>Jumlah</b>		<b>1779</b>	<b>1861</b>	<b>3640</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kantor Desa Kota Garo Tahun 2011-2012*

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk yang berdomisili di desa Kota Garo memiliki pertumbuhan penduduk yang seimbang. Perbedaan jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia tidak jauh berbeda, sedangkan untuk masing-masing kategori umur, dengan perkembangan seperti ini memperlihatkan bahwa perbedaan tingkat umur di masyarakat desa Kota Garo dengan orang yang telah memasuki dunia kerja cukup seimbang. Kendatipun demikian, dari tabel tersebut kelihatan bahwa penduduk laki-laki sebanyak 1779, sedangkan perempuan sebanyak 1861. Dengan kondisi ini menggambarkan bahwa komunitas penduduk perempuan lebih besar dari komunitas penduduk laki-laki

### **C. Pendidikan**

Penduduk desa Kota Garo secara keseluruhan sudah mengerti akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak yang berada dalam usia sekolah rata-rata sudah mengecap pendidikan di sekolah negeri dan swasta.

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut.

Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Kota Garo bisa dilihat melalui tabel berikut :

**TABEL II**  
**JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI DESA KOTA GARO**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	1
2	TPA/MDA	1
3	Sekolah Dasar/MI	2
4	SLTP	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Kota Garo, 2011-2012*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di desa Kota Garo terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, 1 unit TPA/MDA, 2 unit Sekolah Dasar/MI dan 1 unit SLTP. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada di desa ini, banyaknya sarana pendidikan belum menampung anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah kepada tingkat yang lebih tinggi. Dengan keterbatasan prasarana yang ada maka anak-anak yang telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) melanjutkan pendidikannya ke tempat lain atau kota lain.

Di desa Kota Garo tidak hanya sarana pendidikannya terbatas, tapi tingkat pendidikan penduduknya juga rendah sekali. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang tidak tamat sekolah, bahkan ada diantara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL III**  
**TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA KOTA GARO**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	655	17,99
2	SD sederajat	924	25,38
3	SLTP sederajat	837	22,99
4	SLTA sederajat	591	16,24
5	Perguruan Tinggi	382	10,49
6	Tidak tamat sekolah	251	6,90
<b>Jumlah</b>		<b>3640</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Kota Garo, 2011-2012*

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir sebagian masyarakat desa Kota Garo tidak tamat sekolah, sedangkan yang melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi sangat sedikit sekali. Hal tersebut terjadi karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan sudah merasa cukup jika anak-anaknya sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah pertama saja. Anggapan ini juga didukung oleh keterbatasan sarana dan biaya bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

#### **D. Kehidupan Beragama**

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di dalam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia.



Penduduk desa Kota Garo mayoritas beragama islam, dengan demikian tidak heran jika aktifitas penduduk desa Kota Garo kebanyakan mencerminkan budaya Islami.

**TABEL IV**  
**KLASIFIKASI PENDUDUK DESA KOTA GARO**  
**BERDASARKAN JENIS AGAMA DAN PENGANUTNYA**

<b>No</b>	<b>Jenis Agama</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Islam	3539	97.22
2	Kristen	78	2.14
3	Khatolik	23	0.64
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3640</b>	<b>100</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Kota Garo, 2011-2012*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Kota Gora adalah Islam 3539 orang atau 97.22%, Kristen 78 orang atau 2.14% dan Khatolik 23 orang atau 0.64%. walaupun masyarakat berbeda-beda agama, namun kerukunan hidup mereka terjaga baik. Kehidupan keagamaan berkembang dengan baik dan mengalami peningkatan diberbagai bidang, hal ini terbukti dengan terdapatnya sejumlah rumah ibadah yang digunakan untuk kegiatan ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat acara yang bermamfaat bagi agama mereka masing-masing.

**TABEL V**  
**JUMLAH SARANA KEAGAMAAN DESA KOTA GARO**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Mushalla	7
3	Gareja	4
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

*Sumber Data : Kantor Desa Kota Garo, 2011-2012*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah lembaga keagamaan di desa Kota Garo adalah sebanyak 2 unit masjid, 7 unit mushalla dan 4 unit gereja.

#### **E. Sosial Ekonomi Masyarakat**

Desa Kota Garo dikenal sebagai daerah perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika daerah ini banyak didatangi oleh pendatang dari luar daerah untuk mengais nafkah di sana. Keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Para pendatang dari luar bekerja apapun yang dapat dikerjakan. Selain sebagian dari mereka ada yang menjadi buruh tani, pedagang, nelayan dan sebagainya. Hal senada juga terjadi pada penduduk asli daerah itu, yakni mereka mengerjakan bermacam-macam jenis pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka masing masing.

Para pendatang yang dimaksud adalah mereka yang berasal dari Jawa, Batak, Minang. Kedatangan mereka sebenarnya sudah lama. Namun, dari keterangan yang akurat sebagian besar dari mereka datang sejak perkebunan karet di mulai di desa Kota Garo. Penduduk Desa Kota Garo mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Namun sebagian besar dari penduduk desa Kota Garo adalah sebagai perkebunan kelapa sawit, karena di daerah ini

banyak perkebunan kelapa sawit. Adapun mata pencaharian masyarakat desa Kota Garo dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VI**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA KOTA GARO**  
**MENURUT MATA PENCAHARIAN**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Petani	382	83.58
2.	Pegawai Negeri Sipil	12	2.63
3.	Pedagang	11	2.40
4.	Nelayan	19	4.16
5.	Montir	4	0.87
6.	Tukang	9	1.97
7.	Jasa angkutan	4	0.87
8.	Lain-lain	16	3.51
	<b>Jumlah</b>	<b>457</b>	<b>100</b>

*Sumber data : Kantor Desa Kota Garo 2011-2012*

Dalam tahap ini secara umum dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk asli desa Kota Garo merupakan penduduk yang tingkat perekonomiannya berada pada tingkat menengah, dan tidak dapat dipungkiri ada juga di antara penduduk yang tingkat perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan kalangan yang taraf ekonominya lebih tinggi.

#### **F. Adat Istiadat**

Budaya suatu wilayah merupakan pencerminan dari adat istiadat yang terkait dengan kehidupan manusia dalam dimensi sosial dan diperoleh dari hasil kajian serta kreasi manusia. Oleh karena itu, budaya suatu daerah sangat erat hubungannya dengan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Adat istiadat itu pada dasarnya beraneka ragam sesuai dengan apa

yang dilakukan masyarakat itu sendiri dalam kehidupan mereka, dengan kata lain adat istiadat masyarakat terdiri dari berbagai ragam budaya yang dianut dan diteruskan melalui kegiatan mereka sehari-hari.

Implikasi keragaman suku menyebabkan adat istiadat suatu daerah banyak dipengaruhi oleh aneka ragam suku yang mendiami daerah tersebut. Apabila komposisi masyarakat bersifat homogen, biasanya adat istiadatnya tidak begitu beraneka ragam. Namun demikian apabila masyarakat heterogen, maka adat istiadat yang dimiliki masyarakat tersebut akan mengalami asimilasi budaya. Masyarakat desa Kota Garo dapat dikatakan heterogen karena terdiri dari berbagai suku. Keragaman suku ini memberikan corak budaya yang cukup beragam, untuk lebih jelasnya keragaman suku di desa Kota Garo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL VII**  
**KOMPOSISI PENDUDUK DESA KOTA GARO**  
**BERDASARKAN ETNIS**

No	Suku	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Melayu	3024	83.07
2	Batak	236	6.49
3	Jawa	359	9.86
4	Minang	21	0.58
<b>Jumlah</b>		<b>3640</b>	<b>100</b>

*Sumber. Monografi Desa Kota Garo Tahun 2011/2012*

Tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Garo terdiri dari suku Melayu, 3024 orang atau 83.07%, suku Batak 236 orang atau 6.49%, suku Jawa 359 orang atau 9.86% dan suku Minang 21 orang atau 0.58%. Kendatipun suku yang berada di desa Kota Garo beragam namun adat

kebanyakan yang mereka pakai tetap adat nenek moyang penduduk desa Kota Garo yang pribumi. Itu menunjukkan bahwa masyarakat di desa Kota Garo masih mempertahankan adat istiadat.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG BAGI HASIL MENURUT ISLAM

##### A. Pengertian

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) ikut bentuk *mufaa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ard* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf *qaf* berharkat kasrah dan huruf *ra'* berharkat *fathah* tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong<sup>15</sup>.

Menurut istilah kedua kata tersebut adalah sama.

*Qiradh* adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan<sup>16</sup>.

Dalam buku *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* kaum muslimin tidak ada perselisihan bahwa *qiradh* itu boleh. Pertama bahwa *qiradh* ini sudah ada pada zaman jahiliyah, kemudian diakui oleh Islam.

Mereka juga sepakat bahwa bentuk *qiradh* adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh

---

<sup>15</sup> Al Bassam. Abdullah bin Abdurahman, *Syarah Buluqhul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 21.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 21.

sebagian dari keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh<sup>17</sup>.

Menurut Syakir Sula kata *Mudharabah* diambil daripada perkataan ‘*darb*’usaha’ di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti ‘menyerahkan’. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola<sup>18</sup>.

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengolahnya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *Qiradh* dan *Mudharabah* adalah sama.

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang

---

<sup>17</sup> Imam Ghazali Said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cet. Ke-2, h. 105.

<sup>18</sup> Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.329.

sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan *partner* usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

## **B. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil**

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil.

Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan**

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang



sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi<sup>19</sup>.

#### b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya "jam orang kerja" dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan<sup>20</sup>.

#### c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan retribusi dalam sebuah sistem ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang

---

<sup>19</sup> Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 13.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 33.

warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

#### d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus di pelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban<sup>21</sup>. Allah SWT juga tidak suka kepada ummat-Nya yang berlebihan, hal ini terlampir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 31 yang berbunyi:



Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. A'raaf ayat 31 )<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), h. 66.

<sup>22</sup> Departemen Agama, *op.cit.* h.225.

### C. Macam-Macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil usaha dalam Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut :

#### 1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>23</sup>.

Musyarakah ada dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu aset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama<sup>24</sup>.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

..... 

Artinya: Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS An-Nisa':12).<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 143.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 144.

<sup>25</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 63.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم,

: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ( )

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya.” (HR. Abu Daud dan Hakim).<sup>26</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ada empat macam yaitu:

*a. Syirkah ‘Inan*

Syirkah ‘Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

*b. Syirkah Muwafadhah*

Syirkah Muwafadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan syarat: modalnya harus sama banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, satu agama, dan masing-masing anggota mempunyai hak dan tanggung jawab.

*c. Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan seperti pemborong bangunan.

---

<sup>26</sup> Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006), Juz 1, h. 644.

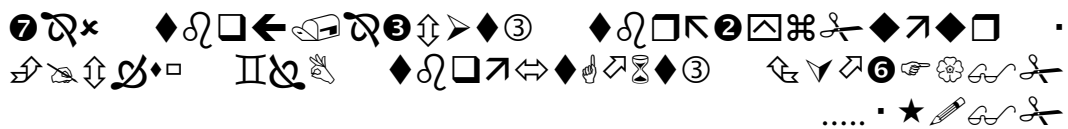
#### d. Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.<sup>27</sup>

#### 2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah

SWT...(Al-Muzammil:20)<sup>28</sup>

عن صالح بن صهيب عن هبیه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم:  
ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا  
للبيع (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Suhaib radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara bertempo, ber-qirad (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah)<sup>29</sup>.

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling menguntungkan. Mudharabah mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu di antaranya

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka-Percetakan Offset, 1993), Cet. ke-3, h. 176-178.

<sup>28</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 459.

<sup>29</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006),Juz 1, h. 395.

menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”.

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha<sup>30</sup>.

Adapun hikmah dibolehkannya muamalah dalam bentuk mudharabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.

Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 244.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 245.

Jenis mudharabah terbagi dua, yaitu :

- a. Mudharabah *Muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah *Muqayyadah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha<sup>32</sup>.

Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila:

- a. Ada mudharib (pengelola)
- b. Ada shohibul maal (pemilik dana)
- c. Ada usaha yang akan dibagi hasilkan
- d. Ada nisbah (keuntungan)
- e. Dan ada ijab qabul<sup>33</sup>.

Dalam kerja sama mudharabah terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:

- a. Pemilik modal yang disebut juga rabbul maal dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan mudharabah atau mudharib sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

---

<sup>32</sup> Safi'i Antonio, *op.cit*, h. 97.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 333.

- b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti<sup>34</sup>.

Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *rabb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara mudharib dan rabb al-mal yang juga menjadi syarat dalam transaksi mudharabah:

- a. Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal 'pemilik modal'.
- b. Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 246.



- c. Mudharib ‘mitra kerja/pengelola’ tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila shohibul mal memberikan dananya, maka mudharib mengkontribusikan kerja dan keahlian. Kontribusi mudharib dapat berbentuk tugas *manajerial*, *marketing*, *entrepreneurship* secara umum<sup>35</sup>.

Apabila mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal di tangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual-beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- b. Apabila akad itu berbentuk mudharabah mutlaqah, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan mudharabah dengan pihak lain dari modal yang diterima itu.
- c. Pekerja dalam akad mudharabah berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak

---

<sup>35</sup> Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. ke-1, h. 335.

mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga<sup>36</sup>.

Untuk mengatur kontribusi mudharabah, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengelola adalah hak eksekutif mudharib, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyediaan dana pekerjaan itu.
- b. Pengelola dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menggunakan upaya mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- d. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.

Hal lain yang diatur dalam konsep mudharabah adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian:

- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 174.

dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.

- b. Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka<sup>37</sup>.

Akad mudharabah dinyatakan batal (berakhir), apabila:

- a. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu batal, atau pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Dan kurang etis apabila pembatalan itu datang dari sepihak.

---

<sup>37</sup> Muhammad Syakir, *op.cit*, h. 336-337.

- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan) yang gugur disebabkan wafat orang yang mewakilkan. Disamping itu akad mudharabah tidak dapat diwariskan (jumhur ulama). Namun, Mazhab ulama Malik berpendapat, bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akadnya tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah dapat diwariskan. Pada umumnya dalam masyarakat pada saat ini, pendapat Mazhab Malik dipergunakan orang.
- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum.
- d. Pemilik modal murtad, (keluar dari agama Islam). Menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah menjadi batal, karena kemurtadan itu. Berdasarkan pendapat ini berarti tidak dibenarkan mengadakan akad mudharabah dengan non-muslim.
- e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebab dikelola oleh pekerja (pelaksana). Umpamanya, setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, apakah karena dibelanjakan, dicuri orang atau sebab-sebab lainnya<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 175.

Dengan sistem mudharabah ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

a. Hak pekerja

1. Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
2. Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.
3. Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
4. Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
5. Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b. Hak pemilik modal

1. Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
2. Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 179.

Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanafiah, Imam Malik dan ulama Mazhab Zaidiyah berpendapat, bila bepergian itu ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional).

Mazhab Hambali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian<sup>40</sup>.

Menurut salah satu pendapat Syafi'i yang terkenal, pihak pekerja tidak sedikitpun tidak memperoleh biaya operasional, kecuali jika pemilik modal menyetujui yang demikian itu. Sedang menurut sebagian fuqaha, pihak pekerja memperoleh biaya operasional. Inipendapat Ibrahim-Nakha'i dan al-Hasan, juga merupakan salah satu pendapat Syafi'i.

Menurut fuqaha lain pihak pekerja memperoleh biaya makan dan pakaian selama dalam perjalanan (kerja), tetapi tidak memperoleh sedikitpun biaya selama tidak melakukan perjalanan. Ini pendapat Malik, Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan jumhur ulama. Hanya saja Malik menambahkan jika harta tersebut memungkinkan untuk dikurangi biaya operasional.

Ats-Tsauri juga menambahkan, pihak pekerja memperoleh ongkos berangkat, tetapi tidak memperoleh ongkos biaya pulang. Sedang menurut

---

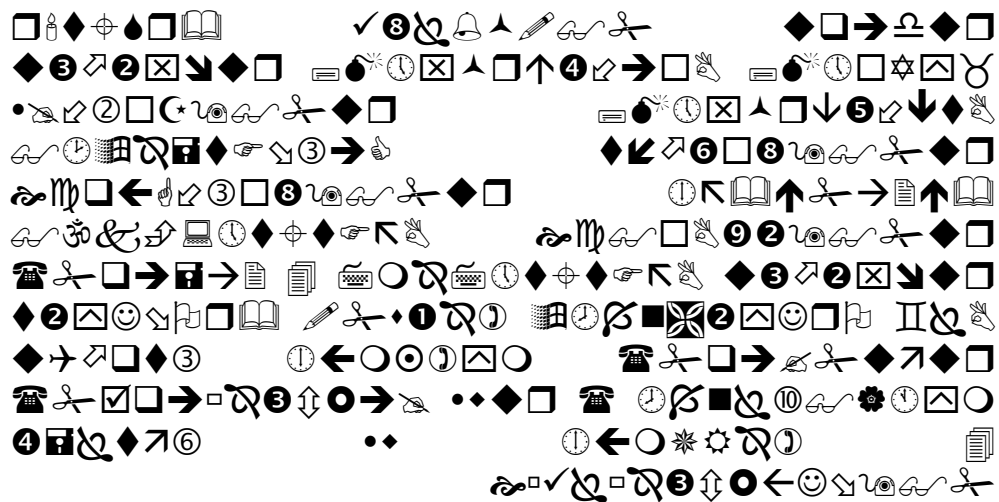
<sup>40</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), Cet. ke-2, h. 173.

al-Laits, ia memperoleh biaya untuk makan siang di kota, tetapi tidak memperoleh biaya makan malam.

Dari Syafi'i juga diriwayatkan bahwa pihak pekerja memperoleh biaya pada waktu sakit. Tetapi pendapat Syafi'i yang populer, sama dengan pendapat jumhur fuqaha, yakni pekerja tidak memperoleh biaya di waktu sakit<sup>41</sup>.

### 3. Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan erat dengan kata tersebut adalah surat Al-An'aam ayat 141:



Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-An'aam : 141)<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Ibnu Rasyd, *op.cit*, h. 116.

<sup>42</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 91.

Sehingga muzara'ah diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen<sup>43</sup>.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رسول الله صلى عليه وسلم : ( له ارض فليزرعها , اوليمفهما اخاه , فان الى فليمسك ارضه )

Artinya : Dari Abi Hurairah Radiyallahu berkata: Berkata Rasulullah Saw: Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. (HR. Bukhari)<sup>44</sup>.  
Rukun dan syarat muzara'ah:

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah :

- e. Pemilik lahan
- f. Petani penggarap (pengelola)
- g. Objek Muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- h. Ijab dan Kabul.

Secara sederhana ijab dan kabaul cukup dengan lisan saja. Namun, sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat Muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad:

<sup>43</sup> Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 245.

<sup>44</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2005), h. 410.



- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
  1. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  2. Batas-batas lahan itu jelas.
  3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
  1. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya)
  2. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen<sup>45</sup>.
  3. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu

---

<sup>45</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 275.

karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dpat juga jauh melampaui jumlah itu<sup>46</sup>.

- e. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- f. Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad muzara'ah, maka ada empat bentuk muzara'ah:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga dipandang sah.
- c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad muzara'ah juga sah.

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h: 117.

d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelolah saja. Alat pertanian seharusnya mengikat kepada petani penggarap, dan bukan kepada pemilik lahan<sup>47</sup>.

#### 4. Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) unruk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Para ulama fikih mendefinisikan, musaqah adalah akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).

Dasar hukum musaqah, ulama fikih sepakat bahwa yang diakadkan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah:

عن أبي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع ( )

Artinya: Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara

---

<sup>47</sup> M.Ali Hasan, *op.cit*, h. 275-278.

dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman. (HR. Muslim).

Rukun dan syarat musaqah:

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat musaqah. Jumhur ulama (Mazhab Malik, Syafi'I dan Hanbali) menyatakan, bahwa rukun musaqah ada lima:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi).
- b. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- c. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu.
- e. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).

Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
- b. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti<sup>48</sup>. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, musah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 280.

musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

1. Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
2. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
3. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
4. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah<sup>49</sup>.

- c. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- d. Bentuk usaha yang dilakukan pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
- e. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:

- a. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, penetapan jangka waktu bukanlah

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit*, h. 111.

merupakan suatu keharusan dalam musaqah, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (*istihsan*) karena musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama *az-Zahiri* sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hambali.

- c. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
- d. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentaenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (*kebun*)<sup>50</sup>.

Musqah sah menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketentuan. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musaqah sah adalah sebagai berikut:

- Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
- Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan.
- Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 280-283.

- Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
- Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.
- Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- Penggarap tidak memberikan musaqah kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.

Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:

- Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
- Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
- Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat penggarap, dan lain-lain<sup>51</sup>.

#### Kewajiban penyiram (musaqi)

Tugas musaqi seperti dikatakan oleh Nawawi, adalah: ia berkewajiban mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka perawatannya untuk mendapatkan buah. ditambahkan pula untuk pohon yang

---

<sup>51</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 216-217.

berbuah musiman, setiap tahun dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, mengurusnya dengan baik, memisahkan pohon-pohon yang berguna dan tumbuh-tumbuhan merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya dan lain-lain.

Adapun untuk yang dimaksud memelihara asalnya (pokok) dan tidak berulang setiap tahun, seperti membangun pematang, menggali sungai, ini kewajiban dari pemilik<sup>52</sup>.

Apabila si penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau fasakhnya, mereka tidak boleh di paksa. Tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu dari tiga hal, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Persetujuan memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
- b. Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai bagian mereka.

Karena dialah yang berhak memotong atau memetik.

- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya<sup>53</sup>.

#### **D. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil**

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu,

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.196.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 170.



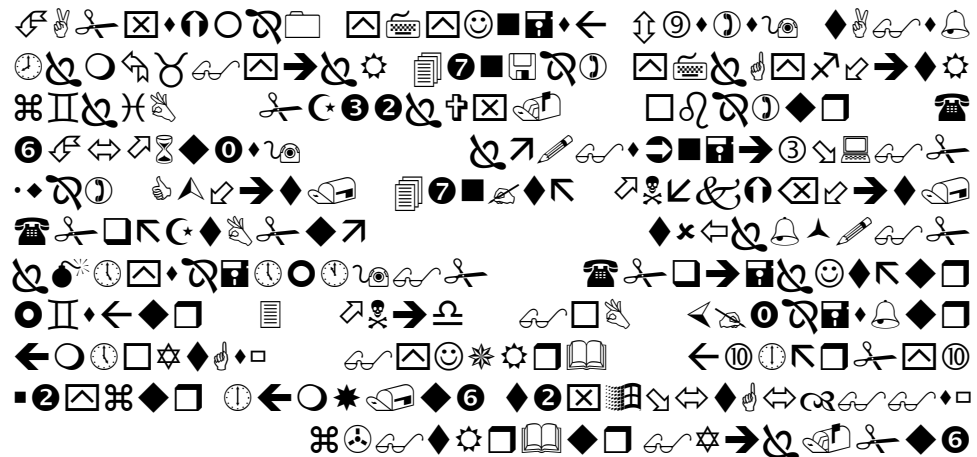


Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah

SWT...(QS. Al-Muzammil : 20)<sup>56</sup>

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an

Surat Shaad ayat 24:



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Shaad : 24)

#### b. As-Sunnah

Menurut istilah syara' assunnah adalah suatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau *taqrir* (persetujuan), *assunnah* (sunnah ucapan) ialah hadits-hadits Rasulullah SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan<sup>57</sup>.

Salah satu kehujjahan assunnah atau hadits adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata:

<sup>56</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 459.

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, h. 37.

كان احدا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضوأخيه,  
أن له النصف مما يغنم.

Artinya: “ Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (*nidhwun*) temannya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi” (HR. Ahmad dan Abu Daud)<sup>58</sup>.

Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan assunnah dengan Al-qur'an adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-qur'an, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan hukum jika terdapat dalam Al-qur'an. Sehingga Al-qur'an merupakan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika di dalam Al-qur'an tidak di jumpai, maka harus kembali kepada sunnah. Dan apabila di dalam sunnah terdapat atau di jumpai hukum yang pasti, maka assunnah di ikuti<sup>59</sup>.

#### c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian<sup>60</sup>.

Maka dari itu, jika terdapat suatu kejadian yang di hadapkan kepada seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka disebut hukum ijma' di anggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Dari definisi di atas hanya di katakan setelah Rasulullah SAW wafat,

19. <sup>58</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006), Juz 1, h.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 41.

<sup>60</sup> Abdul Wahab Khallaf, *op.cit*, h. 49.

karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliau lah tempat bertanya dan kembalinya syari'ah Islam.

Berikut kehujjahan ijma' adalah firman Allah SWT:



Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa':83)<sup>61</sup>.

### E. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil

Jumhur ulama berpendapat bahwa kebolehan bagi hasil. Menurut pendapat mereka, bagi hasil ini dikecualikan oleh assunnah dari larangan menjual sesuatu yang belum terjadi, dan dari sewa menyewa yang tidak jelas. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab:

الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيحرص بينه

وبينهم ثم يقول:

.

<sup>61</sup> Departemen Agama, *op.cit*, h. 83.

Artinya: Adalah Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah, kemudian menaksir (pembagian) antara Rasul dengan mereka, lalu ia berkata, “Jika kamu suka, maka (bagian ini) untukmu, maka bagian ini untuk-ku”<sup>62</sup>.

Hukum sahnya bagi hasil menurut Imam Malik, bahwa akad bagi hasil itu merupakan akad yang mengikat (lazim) dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Tidak demikian halnya dengan qiradh yang baru bisa terjadi (terwujud) dengan adanya perbuatan (pekerjaan), bukan dengan kata-kata.

Imam Malik juga berpendapat bahwa akad bagi hasil merupakan akad yang dapat mendatangkan orang yang bisa dipercaya untuk bekerja, mana kala ahli waris (dari orang yang mengadakan akad) tidak dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itulah yang harus bekerja, jika ahli waris menolak harta peninggalannya<sup>63</sup>.

Imam Syafi’i berkata: apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartinya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal merestuinnya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut.

---

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), Cet. ke-1, .h. 250.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 260.

Jika seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah (bagi hasil), lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya (yakni dengan perkataannya), maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak pengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.

Adapun Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa pengelola modal dalam usaha mudharabah tidak perlu mengganti rugi. Apa saja yang ia pinjamkan adalah sesuatu yang diperbolehkan.

Pendapat ini menjadi pandangan Abu Yusuf. Sedangkan Ibnu Abu Laila berpendapat bahwa pengelola modal harus mengganti rugi kecuali ia dapat mengajukan bukti bahwa pemilik harta telah memperkenankannya melakukan transaksi tidak tunai. Tapi bila pengelola memberikan modal kepada orang lain sebagai utang, maka ia harus mengganti rugi menurut pendapat keduanya, sebab utang-piutang tidak masuk bagian usaha mudharabah<sup>64</sup>.

Al-'Allaamah Ibnu Qayyim berkata," Mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang dipercaya, orang yang diupah, wakil dan mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercaya ketika memegang harta pemiliknya; ia sebagai wakil ketika ia mengembangkan harta tersebut; ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut; dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya mudharabah ini

---

<sup>64</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah, *Terjemahan Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 137.

disyaratkan agar bagian pekerja ditentukan, karena ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan.”

Ibnu Mundzir berkata, ”para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 468.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sistem Akad Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir.**

Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dan seseorang adalah *Muzara'ah*, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda usaha tersebut. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama bagi hasil dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan antara pemilik lahan dan pengelola ialah perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau perjanjian tertulis.<sup>66</sup>

Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah bagi hasil adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu

---

<sup>66</sup> Dimas, Petani Penggarap, Wawancara, Kota Garo, 22 Maret 2012



bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan responden mengadakan perjanjian bagi hasil tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan bagi hasil ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian bagi hasil ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik kebun.<sup>67</sup> Walaupun perjanjian bagi hasil (kontrak) sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik kebun tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakati pada saat akad.<sup>68</sup> Sehingga kelemahan pada perjanjian sistem bagi hasil yang tidak tertulis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada hal tersebut yang menyusahkan atau merugikan salah satu pihak. Berikut ini, akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden, dapat diketahui pendapat responden tentang ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis, yaitu sebanyak 3 orang responden mengatakan penting karena

---

<sup>67</sup> H. Nasir, Pemilik Kebun, Wawancara 23 Desember 2011

<sup>68</sup> Suyatno, Petani Penggarap, wawancara, 29 Maret 2012

menurut mereka dari sanalah perjanjian dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun, menurut 7 orang responden yang mengatakan tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.<sup>69</sup>

Akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan *Muzara'ah*, yaitu diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kasus ini, pemilik kebun bertindak sebagai pemilik modal yaitu menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja.

Dari hasil observasi penulis di lapangan, adapun bentuk akad perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu:

*Pertama*, sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua lagi catatan peralatan dan kerusakan alat diranggung oleh pemilik kebun.

*Kedua*, separoh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separoh

---

<sup>69</sup> Bahar, Petani Penggarap, Wawancara, 29 Maret 2012

Lagi untuk pemilik kebun atau lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan Alat ditanggung oleh pengelola.

Apabila dilihat dari kedua bentuk akad di atas, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

#### **B. Aplikasi Akad Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir.**

Berbicara tentang aplikasi sistim akad bagi hasil antara pemilik kebun dengan pengelola atau pekerja, penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada bentuk perjanjian yang telah dipaparkan di atas. Pada bentuk akad yang pertama, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu separoh untuk pengelola atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun dari hasil panen, dengan catatan bahwa peralatan dan kerusakannya ditanggung oleh pengelola.<sup>70</sup> Berikut ini akan digambarkan pendapat responden mengenai system bagi hasil tanpa ikatan tertulis.

Pada saat akad, pemilik lahan atau pemilik kebun bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan peralatan serta menanggung kerusakan alat-alat, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya dua pertiga untuk pemilik kebun dan sepertiga untuk pengelola,

---

<sup>70</sup> Syafriyal, Pemilik Keben, wawancara, 30 Maret 2012

dengan catatan bahwa pemilik kebun menanggung semua biaya peralatan dan kerusakannya, dan petani penggarap hanya sebagai pekerja. Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

Namun, aplikasi dan kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pengeloa atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pengeloa, sehingga setelah dihitung pengeloa mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga dan waktu. Menurut hasil wawancara penulis dengan pengelola, pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap akhir bulan, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyarikah merasa rugi, yaitu pengelola.

Menurut pengakuan pekerja kepada penulis, mereka tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplek kepada si pemilik kebun atau lahan justru mereka tidak di grubris oleh pemilik kebun atau lahan, apalagi yang membuat pekerja makin terpuruk yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas apalagi yang diakui oleh notaris.<sup>71</sup>

Sistem kerjasama bagi hasil di atas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak petani penggarap, petani penggarap merasa rugi dari hasil kerjasama tersebut, sebab setelah dijalani mereka merasakan

---

<sup>71</sup> Arman, Petani Penggarap, Wawancara, 30 Maret 2012

kerugian karena dalam pelaksanaannya ternyata mereka (petani penggarap) yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan alat, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Ternyata yang lebih membuat pihak pekerja tidak bisa berbuat apa-apa yaitu perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi, sehingga pihak pemilik lahan bertindak leluasa kepada pihak pekerja.<sup>72</sup>

Sementara itu, pada bentuk perjanjian yang kedua akad ini merupakan kebalikan dari bentuk perjanjian yang pertama, yaitu pemilik kebun atau lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan peralatan, sedangkan petani penggarap bertindak sebagai pekerja, yang mana hasilnya 65% untuk pemilik kebun atau lahan dan 35% untuk petani penggarap, dengan catatan bahwa petani penggarap menanggung semua biaya kerusakan peralatan, dan pemilik kebun atau lahan hanya sebagai pemodal saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden, bahwa pembagian hasil panen pada setiap akhir bulan. Namun yang membuat tidak sesuai dengan akad pada awal perjanjian yaitu pada saat pembagian pekerja selalu ada mengalami kerugian setelah dikeluarkan keperluan sehari-hari, mulai dari biaya makan, obat-obatan dan kesejahteraan pekerja hingga biaya perbaikan alat-alat, maka pihak pekerja selalu mengeluh dengan hasil yang ia peroleh setelah dibagi dengan pemilik lahan.<sup>73</sup>

Pada kasus ini, 35% dari jumlah keseluruhan yang akan dibagikan kepada pekerja adalah jumlah kotor, belum dikeluarkan biaya-biaya keseluruhan, sehingga setelah dikeluarkan biaya-biaya tersebut secara

---

<sup>72</sup> Malun, Petani Penggarap, Wawancara, 30 Maret 2012

<sup>73</sup> Nasution, Petani Penggarap, Wawancara, 29 Maret 2012

otomatais akan berkurang dari bagian yang semestinya. Sementara itu, pemilik kebun tidak mau tau dengan biaya-biaya tersebut, dia hanya tau bagiannya adalah 65% dari dari biaya keseluruhan.

Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap adalah akad kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) dari keuntungan. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati diawal.

### **C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap dengan Pemilik Kebun**

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.<sup>74</sup> Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.<sup>75</sup> Mohammad Daud Ali<sup>76</sup> mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>77</sup> Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran

---

<sup>74</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 70.

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 896.

<sup>76</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cetakan ke-8, h. 50-52.

<sup>77</sup> Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari'ah.

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

#### 1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57) 4 :



Artinya: "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan.

Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat

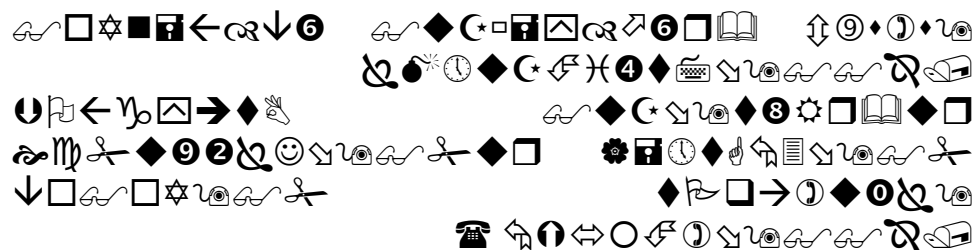
sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT.<sup>78</sup>

## 2. Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".<sup>79</sup>

## 3. Asas Keadilan (*Al 'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman :



Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29



Artinya: "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil".

<sup>78</sup> M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. 1., h. 125-126.

<sup>79</sup> Yeni Salma Barlinti, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001., h. 78-79.

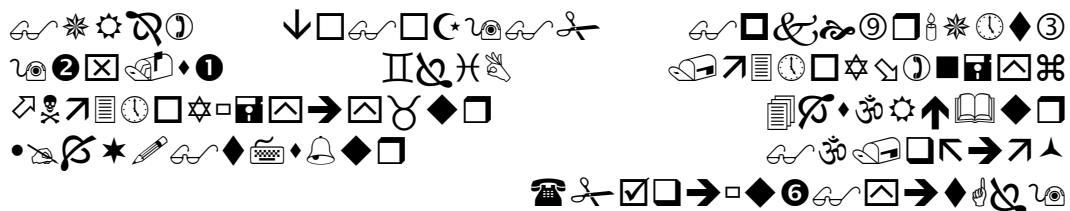


Pada asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>80</sup>

#### 4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.<sup>81</sup> Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13



Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

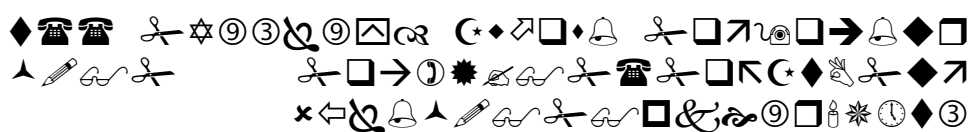
<sup>80</sup> Gemala Dewi (2006), *Hukum Perikatan ...*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 32-33.

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”

#### 5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash Shidiq*)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.<sup>82</sup> QS.al- Ahzab (33): 70



Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

#### 6. Asas Tertulis (*Al Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.<sup>83</sup> Dalam QS.al-Baqarah (2); 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.<sup>84</sup>

Berdasarkan azas hukum kontrak yang telah penulis paparkan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemilik kebun dengan pemilik kebun

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>83</sup> *Ibid*. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 124.

<sup>84</sup> Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 37-38.

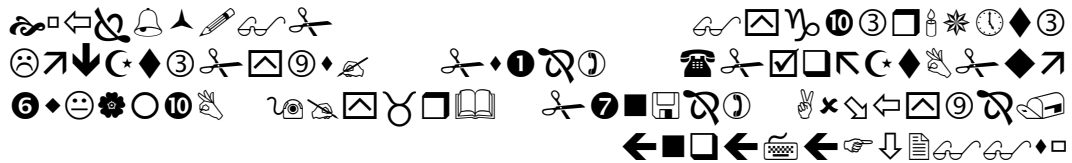
tidak sesuai yaitu salah satu perjanjian yang mereka laksanakan tidak tertulis, dan di khawatirkan akan melanggar azas-azas yang lain.

Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam masalah perekonomian, manusia ditakdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap terjaga, pihak yang kekurangan dana biasanya mencari pinjaman (utang) kepada pihak yang berkelebihan dana (piutang), dan apabila kesepakatan diperoleh, maka transaksi pinjam meminjam atau utang piutang di antara mereka pun terealisasi.

Secara formal didukung oleh perjanjian kredit secara tertulis, kemudian ditindak-lanjuti dengan pembukuan transaksi, dan faktor terakhir ini memerlukan perhatian serius dari kedua belah pihak yaitu Pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, demi keselamatan dan kemaslahatan mereka masing-masing.

Namun bila dicermati lebih lanjut, tuntutan membuat perjanjian tertulis dan pembukuan yang tertib dalam masalah perjanjian, ternyata bukan monopoli hukum semata. Karena hal yang sama dapat pula ditemui di dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang sejak awal dikenal sebagai sumber hidayah dan jalan keselamatan bagi ummat manusia.

Salah satu ayat yang memperkuat statemen tersebut di atas, termaktub pada Surah Al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya”.

Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo.

Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur’an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Di sisi lain, ungkapan “menulis” pada ayat ini nampaknya memiliki dua pengertian atau makna. *Pertama*, ungkapan “menulis” dapat diartikan sebagai perintah melakukan “pencatatan transaksi” yang nota bene merupakan bagian dari akuntansi. *Kedua*, ungkapan “menulis” dapat pula diartikan sebagai perintah membuat “perjanjian tertulis” yang merupakan aturan hukum.

Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi, kedua perangkat tersebut yaitu “perjanjian tertulis” dan “pencatatan

transaksi”, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha. Bagaimanakah hubungan kedua unsur tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mencoba membahasnya dengan mengelompokkan pembahasan menjadi dua sub judul yaitu aspek hukum (perjanjian tertulis), dan aspek akuntansi (pencatatan transaksi).

#### 1. Aspek Hukum (Perjanjian Tertulis)<sup>85</sup>

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Jika penulis yang berpengalaman telah ditemukan, maka sang penulis tersebut harus menulis muamalah dengan benar, tidak menyalahi ketetapan Allah SWT dan tidak pula melanggar ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, seorang penulis semestinya tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu pada ayat tersebut. Karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga kriteria bagi

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

seorang penulis, yaitu kejujuran, kemampuan tulis baca dan memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara “menulis perjanjian”.

Jadi, pengertian “menulis perjanjian” seperti dikemukakan DR. M. Quraish Shihab adalah membuat perjanjian tertulis. Bahkan dalam Wawasan Al-Qur'an (2004), Beliau menyatakan apabila dianggap perlu, pihak yang bermuamalah bisa meminta bantuan notaris untuk membuatkan perjanjiannya.

Sementara itu, Gemala Dewi SH, LLM, di dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (2004) mengemukakan bahwa sesuai penggarisan pada Surah Al-Baqarah 282, salah satu aspek dalam perikatan Hukum Islam adalah “asas tertulis” atau Al-Kitabah. Asas ini diperlukan terutama untuk transaksi dalam bentuk kredit.

Sedangkan Drs. Ikhwan Hamdani MAg di dalam Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Islam (2003) menyatakan bahwa salah satu nilai dasar Perekonomian Islam ketika seseorang melakukan muamalah (perdata) adalah membuat “perjanjian tertulis” di hadapan saksi seperti dimaksudkan pada Surah Al-Baqarah 282. Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik dalam jumlah, maupun kualitas orangnya.

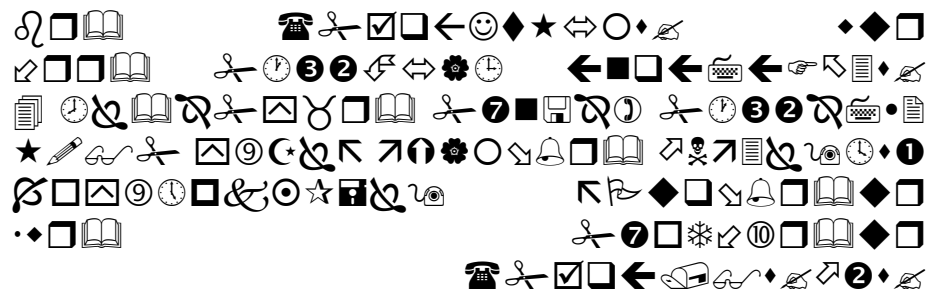
Dari beberapa pendapat ahli tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dilihat dari berbagai segi yaitu segi penfsiran Al-

Qur'an, segi Hukum Islam dan Norma Dasar Perekonomian Islam, maka perintah menulis muamalah pada Al-Baqarah 282 dapat diartikan sebagai amanat untuk membuat “perjanjian tertulis”.

Dengan merujuk kepada KUH Perdata sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian tertulis dalam konteks ini dapat berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

## 2. Aspek Akuntansi (Pencatatan Transaksi)<sup>86</sup>

Aspek Akuntansi (pencatatan transaksi) pada Surah Al-Baqarah 282 dapat diketahui sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

Apabila disimak lebih seksama, maka perintah “menulis hutang tanpa jemu-jemunya” pada ayat ini, dapat diartikan sebagai petunjuk untuk mencatat transaksi secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

<sup>86</sup> *Ibid.*

Dari bagian ayat tersebut di atas, terungkap pula bahwa perintah melakukan pembukuan dilandasi oleh tiga hal, yaitu :

- a. “Lebih adil di sisi Allah”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pembukuan sebagaimana diperintahkan Allah SWT lebih menjamin tercatatnya semua transaksi secara benar dan akurat, sehingga potensi terjadinya kekeliruan atau ketidakadilan pada kedua pihak dapat dihindari.

Dengan pembukuan yang teratur dan konsisten, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal angsuran, pihak berhutang tidak membayar jumlah yang lebih kecil dari semestinya; begitu pula sebaliknya, pihak berpiutang tidak melakukan penagihan melebihi haknya. Untuk mewujudkan kondisi ini, kedua belah pihak dengan sendirinya harus melakukan pembukuan secara teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.

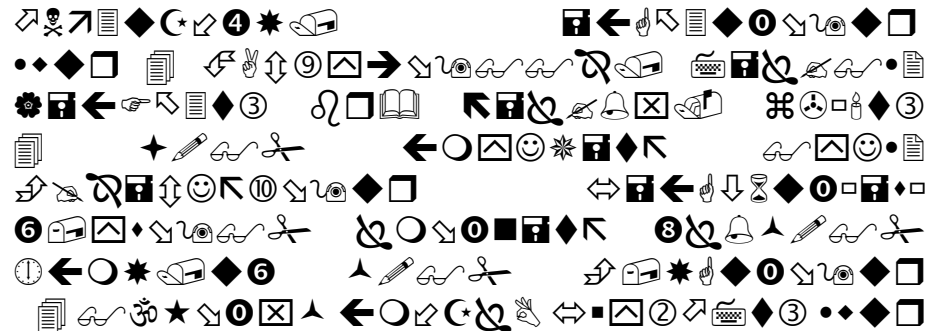
- b. “Lebih dapat menguatkan persaksian”. Mengandung makna bahwa keterangan dalam suatu persaksian semakin kuat dan meyakinkan apabila didukung oleh pembukuan yang akurat.
- c. “Lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

Bermakna bahwa adanya pembukuan yang bisa dilihat wujudnya,

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara petani penggarap dan pemilik kebun adalah sebagai berikut:



Bentuk perjanjian yang mereka laksanakan tidak syah karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai dapat dikaji pada Surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut:



Artinya: "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (Q.S al-Baqarah: 282)

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis pada ayat ini mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk sistem akad bagi hasil adalah pertama, sepertiga dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan dua pertiga lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan yang bertindak sebagai pemodal, dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pemilik kebun. Kedua, separuh dari hasil panen untuk pengelola atau pekerja dan separoh lagi untuk pemilik kebun atau pemilik lahan dengan catatan peralatan dan kerusakan alat ditanggung oleh pengelola.
2. Amplikasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, sipemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola, sehingga setelah dihitung pengelola mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan ,rugi dari tenaga dan waktu.
3. Bentuk perjanjian sitem bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik kebun atau lahan dengan pihak pengelola atau pekerja didesa kota garo kecamatan tapung hilir, menurut fiqih mu'amalah batal karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian sistem bagi hasil harus secara tertulis dan pembagian harus dengan adil.

#### B.Saran-saran

1. diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan sistem bagi hasil yang Baik, yang sesuai dengan ketentuan ajaran syariat islam, supaya dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pemilik kebun maupun pengelola.
2. Kepada pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan kepada Masyarakat melakukan sistem bagi hasil, supaya tidak menimbulkan permasalahan dan perselisihan antara pemilik kebun dengan pengelola.

Diharapkan dari saran-saran ini bisa menimbulkan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sistem bagi hasil dengan sembarangan, karena bisa mengakibatkan putusnya hubungan silaturrahim antara ummat sesama muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Bairut : Darul Kutub Al-Aliyah, 1992)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Imam Taqyuddin abi bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terjemahan Rifa'i dkk, (semarang : CV. Toha Putra, 1978)
- Moh. Soejani, Rozi Munir, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Penerbit Universitas Indonesia, Yogyakarta. 1987.
- Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Jakarta, PT. Intermasa, 1992.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1996) Cet. I.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Beirut-al Fikr 1983, Jilid III.
- Wahbah, Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islami Wal 'Adillatuhu*, (Bairut : Darul Fikri, 1989) Juz IV

1. Apakah bapak menggunakan sistem bagi hasil ?
  - a. Ya
  - b. tidak
2. Apakah bapak memelihara kebun orang lain ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Apakah bapak mengerjakan lahan kosong kemudian ditanami pohon yang berbuah ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
4. Apakah bapak menggarap lahan orang lain ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah pertanian dapat meningkatkan ekonomi?
  - a. Ya
  - b. tidak
6. apakah pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
7. Apakah pertanian dapat mengurangi pengangguran ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
8. Apakah bapak membuat kesepakatan mengenai untung ?

- a. Ya
  - b. Tidak
9. Apakah modal di tanggung oleh pemilik lahan ?
- a. Ya
  - b. Tidak
10. Apakah sistem bagi hasil dapat meningkatkan rasa kekeluargaan ?
- a. Ya
  - b. Tidak

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sistem bagi hasil yang bapak lakukan ?
2. Apakah bagi hasil yang bapak lakukan memakai ikatan yang jelas?
3. Apa pihak pemilik kebun menjalankan perjanjian yang disepakati?
4. Mengapa perjanjian bagi hasil tersebut tidak secara tertulis?
5. Bagaimana akad sistem bagi hasil yang bapak lakukan?
6. Apakah bapak pernah mengeluh tentang sistem akad bagi hasil seperti ini ?
7. Apa kendala yang dalam sistem bagi hasil?
8. Apakah sistem bagi hasil meningkatkan perekonomian?
9. Apakah dengan sistem bagi hasil memper erat rasa kekeluargaan?